

Strategi Indonesia dalam Mencapai *Blue Economy Roadmap* Melalui *National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP)

Nur Ainun Musdalifah^{1*}, Darwis², Imam Fadhil Nugraha³

^{1,2,3} Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Hasanuddin, Indonesia

nurainunmusdalifah643@gmail.com^{1*}, darwis.hi@unhas.ac.id², Imamfadhil86@gmail.com³

Alamat Kampus: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea,

Korespondensi penulis: nurainunmusdalifah643@gmail.com

Abstract. *The blue economy concept is very suitable for island countries with abundant biodiversity. Blue economy prioritizes ecosystem sustainability with marine resources as the main subject. Indonesia sees this concept as an opportunity to utilize its potential through the launch of the Indonesia blue economy roadmap. The Indonesia blue economy roadmap is a very complex design and the challenges ahead are very risky to the goals to be achieved. The international partnership strategy is one of Indonesia's steps in achieving the goals of the Indonesia blue economy roadmap. The partnership strategy is known as the National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP). This research uses qualitative research methods with library research data collection techniques to see NBAAP as a partnership strategy to support the achievement of the Indonesia blue economy roadmap. The results of the research will discuss the priority sectors of the Indonesia blue economy roadmap, the challenges and problems of the sector, the pillars in the NBAAP partnership strategy, and the NBAAP Program that supports the Indonesia blue economy roadmap. With this in-depth understanding, it is expected that Indonesia's international partnership strategy in the blue economy can support the achievement of the goals in the Indonesia blue economy roadmap.*

Keywords: *Blue Economy, Partnership Strategy, Marine Resources, Priority Sectors.*

Abstrak. Konsep *blue economy* sangat sesuai bagi negara-negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. *Blue economy* mengedepankan pada keberlanjutan ekosistem dengan subjek utama yakni sumber daya laut. Indonesia melihat konsep ini sebagai peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada melalui peluncuran *Indonesia blue economy roadmap*. *Indonesia blue economy roadmap* adalah rancangan yang begitu kompleks dan tantangan kedepannya sangat beresiko terhadap tujuan yang ingin dicapai. Strategi kemitraan internasional menjadi salah satu langkah Indonesia dalam mencapai tujuan *Indonesia blue economy roadmap*. Strategi kemitraan tersebut dikenal dengan *National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) untuk melihat NBAAP sebagai strategi kemitraan mendukung tercapainya *Indonesia blue economy roadmap*. Hasil penelitian akan membahas tentang sektor-sektor prioritas *Indonesia blue economy roadmap*, tantangan dan permasalahan sektor tersebut, pilar-pilar dalam strategi kemitraan NBAAP, serta Program NBAAP yang mendukung *Indonesia blue economy roadmap*. Dengan pemahaman mendalam ini, diharapkan strategi kemitraan internasional Indonesia dalam *blue economy* dapat menunjang tercapainya tujuan dalam *Indonesia blue economy roadmap*.

Kata Kunci: Blue Economy, Strategi Kemitraan, Sumber Daya Laut, Sektor Prioritas.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang bercorak maritim memiliki wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022, luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² dan juga memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km dan diperkirakan nilainya mencapai 19,6 triliun per tahun. Wilayah laut yang sangat luas menyimpan banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Pemanfaatan potensi yang ada dapat membawa banyak keuntungan dan berpengaruh terhadap

tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi (Aryanti & dkk, 2023, p. 16). Melihat potensi ini, Indonesia sebagai negara maritim memerlukan ide dan gagasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Ide dan gagasan berkelanjutan tersebut dikenal dengan istilah *blue economy*.

Blue economy atau ekonomi biru adalah gagasan dan ide pembangunan yang berfokus dan berorientasi pada laut. *Blue economy* mengedepankan kepada Pembangunan yang berkelanjutan (Ghalidza, 2020, pp. 23-31). Konsep *blue economy* kemudian diadopsi oleh Indonesia dengan meluncurkan konsep yang dikenal dengan istilah Indonesia *blue economy*. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 menjabarkan tentang kerangka pembangunan *blue economy* Indonesia yang dituliskan dalam visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025 yang dikeluarkan oleh kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020. Kerangka Pembangunan ini juga selaras dalam mencapai *Sustainability Development Goals* tujuan (14) tentang Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan buku dengan judul *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation* sebagai pedoman dalam mendefinisikan *blue economy* sebagai pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan (BAPPENAS, 2021, p. 1).

Kementerian PPN/Bappenas menjadwalkan pertemuan *G20 Development Ministerial Meeting* (DMM), bertajuk “*The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap*” di Belitung, pada tanggal 7-8 September 2022. Agenda ini ditujukan untuk menyusun peta jalan ekonomi baru Indonesia yang dikenal dengan Indonesia *Blue Economy Roadmap* (BAPPENAS, 2022, p. 1). Buku Indonesia *Blue Economy Roadmap* diluncurkan secara resmi pada tahun 2023. Buku ini mencakup berbagai inisiatif dalam misi *blue economy* Indonesia yang berorientasi pada Pembangunan berkelanjutan (Sambodo & dkk, 2023, pp. 12-14). Indonesia *Blue Economy Roadmap* menjelaskan mengenai *action plan* Indonesia untuk mendukung kelancaran program *blue economy* di masa yang akan datang salah satunya melalui strategi kemitraan internasional yang diluncurkan pada tanggal 14 November 2022 di kegiatan Summit G20 Bali yaitu *National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP) (Kemenko Maritim dan Investasi, 2022, p. 1).

Program *blue economy* yang begitu menjanjikan bagi Indonesia kemudian memunculkan strategi yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mitra pembangunan dan

pemerintah Indonesia sendiri yang dikenal dengan *National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP). Kemitraan tersebut berfokus pada kerjasama internasional Indonesia dengan organisasi-organisasi Internasional dalam mencapai Indonesia *blue economy roadmap* yang telah diluncurkan. Prioritas kerjasama ini yakni sektor perikanan dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang aktivitas perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, tulisan ini akan melihat dan menjelaskan bagaimana kemitraan internasional yang diinisiasi oleh Indonesia yakni NBAAP menunjang Indonesia *blue economy roadmap* dan juga bagaimana kemudian sektor-sektor yang akan dikembangkan dalam Indonesia *blue economy roadmap* sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam NBAAP. Dengan ini, keberhasilan *blue economy* Indonesia dapat dicapai dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dapat pula ditingkatkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Blue Economy*

Gunter Pauli pada tahun 2010 menulis sebuah buku yang berjudul "*The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*" yang menjadi awal bagi Pauli untuk memperkenalkan istilah *blue economy*. *Blue economy* dilandaskan pada pertumbuhan positif ekonomi suatu negara dengan tetap memperhatikan ekosistem yang ada sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. *Blue economy* mengedepankan pada aspek inovasi dan kreativitas yang meliputi penataan sistem manajemen sumber daya, efisiensi pada sistem produksi dan variasi produk yang dihasilkan. Aktivitas ekonomi pada konsep *blue economy* berpusat pada sumber daya laut yang dimiliki suatu negara (Nurfauzi & Mansur, 2022, pp. 75-82).

Selain berpusat pada potensi kelautan dan perikanan, konsep *blue economy* banyak dilirik oleh negara-negara maritim karena banyak faktor yang mendukung. *Blue economy* sangat memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip *blue economy* dijelaskan pada *The World Commission on Environment and Development* tahun 1987 dan hasil dari *Rio+20* di Rio de Janeiro, Brazil yang diselenggarakan pada tahun 2012 yang terdiri atas empat prinsip, yaitu keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tidak menghasilkan limbah, dan kepedulian sosial (Darajati, 2024, pp. 15-17).

Selain prinsip yang dimiliki oleh *blue economy*, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan *blue economy*. Perubahan iklim global yang begitu fluktuatif seperti peningkatan suhu permukaan laut berakibat pada penurunan hasil tangkapan

laut. Kondisi lainnya yakni perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya angin topan atau badai sehingga dapat merusak fasilitas perikanan dan infrastruktur. *Overfishing* (penangkapan ikan berlebihan) dapat berakibat pada populasi laut dan akan mengancam keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem laut. Polusi dan pencemaran laut adalah tantangan yang serius karena akan mengganggu keberlanjutan ekosistem laut. Terganggunya ekosistem laut dapat merusak potensi pariwisata bahari dan menurunnya produktivitas sektor perikanan. Praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* sangat merugikan nelayan dan perekonomian suatu negara. *IUU fishing* juga dapat mengganggu stabilitas politik antar-negara. Kekurangan teknologi dan infrastruktur dalam menunjang pemanfaatan sumber daya laut juga menjadi tantangan. Teknologi dan infrastruktur yang memadai membuat aktivitas perekonomian lebih efisien dan berkelanjutan (Aryanti & dkk, 2023, pp. 18-24)

Kerjasama Internasional

Hal yang penting untuk suatu negara tetap bertahan di era global sekarang yakni melakukan kerjasama internasional. Menurut Holsti, kerjasama internasional dapat digambarkan sebagai proses bagi negara-negara untuk saling berhubungan secara bersama (Holsti, 1988). Pendefinisian lainnya yakni menurut Koesnadi Kartasasmita (1997) yang mendefinisikan kerjasama internasional sebagai akibat dari adanya hubungan internasional itu sendiri dan diakibatkan pula pada kompleksitas kehidupan manusia dalam tatanan masyarakat internasional (Akase, Waha, & Lengkong, 2023, pp. 1-9). Secara umum, kerjasama internasional terbagi menjadi beberapa bentuk dan sering dijumpai dalam hubungan antarnegara, seperti kerjasama bilateral, kerjasama regional, kerjasama multilateral dan kerjasama antarregional (Wardani & Budiawan, 2021, pp. 547-554).

Kerjasama regional adalah kerjasama yang sangat umum terjadi yakni kerjasama yang terjadi antara dua negara. Misalnya, kerjasama antara Indonesia dan Australia. Kerjasama ini pada umumnya di bidang ekonomi, walaupun untuk bidang-bidang lain juga dapat dilakukan kerjasama. Kerjasama regional didefinisikan sebagai kerjasama antarnegara yang berada dalam satu kawasan atau wilayah seperti pada kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah ASEAN. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan kawasan yang aman dan perdagangan bebas. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang terdiri atas beberapa negara didalamnya dan tidak didasarkan pada satu kawasan saja misalnya pada Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kerjasama antarregional didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh satu regional dengan regional lainnya misalnya *Association of Southeast*

Asian Nations (ASEAN) yang bekerjasama dengan MEE (Wardani & Budiawan, 2021, pp. 547-554).

Melihat kondisi perkembangan dunia sekarang, kerjasama internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar-negara atau antar-regional tetapi juga melibatkan aktor-aktor non negara lainnya. Perkembangan organisasi-organisasi internasional membawa pengaruh terhadap bentuk-bentuk kerjasama internasional yang terjadi. Negara tidak hanya melakukan hubungan kerjasama dengan negara atau regional tertentu, tetapi mulai melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang semakin banyak. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilihat pada kerjasama Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga organisasi internasional yang berfokus pada suatu isu atau bidang, seperti *World Trade Organization* (WTO), *Food and Agricultural Organization* (FAO), *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan organisasi internasional lainnya (Bagaskara, 2018, pp. 367-375).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Metode penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian yang menggunakan narasi atau deskriptif dalam menjelaskan dan menganalisis berbagai gejala, fenomena dan situasi sosial. Metode ini membantu penulis dalam melihat kerjasama yang dicanangkan Indonesia, aktor-aktor yang terlibat dan faktor-faktor yang mendukung dalam mencapai Indonesia *Blue Economy Roadmap*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah (jurnal), *website* yang terpercaya dan publikasi elektronik lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia *Blue Economy Roadmap*

Indonesia melihat begitu melimpahnya kekayaan laut yang dimiliki namun masih belum dimanfaatkan dengan baik. Indonesia sebagai negara maritim dapat menerapkan konsep *blue economy* untuk mencapai perekonomian dalam sektor laut. Perairan Indonesia sangat menjanjikan untuk pengembangan di berbagai sektor, seperti pariwisata, industri kelautan, transportasi laut, dan masih banyak sektor lainnya. Data dari *World Bank* menyatakan bahwa setiap tahunnya nilai perekonomian kelautan Indonesia mencapai USD 280 miliar dengan berfokus pada dua sektor utama yakni pembangunan kelautan dan manufaktur. Kegiatan *blue economy* Indonesia sejak dahulu sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tetapi hanya

terbatas pada pemanfaatan secara konvensional. Pemanfaatan yang dilakukan dengan cara konvensional memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam lima tahun terakhir yakni 3,6 persen dan masih tergolong sangat rendah. Kondisi lain dalam rentang waktu antara tahun 2012-2020 menunjukkan ekonomi biru Indonesia tumbuh sekitar 10,5 persen setiap tahun (Sambodo & dkk, 2023, p. 14). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pada sektor *blue economy* sangat besar jika dieksekusi oleh Indonesia secara strategis.

Indonesia *blue economy* juga selaras dengan visi Indonesia dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa tujuan tersebut yakni memberantas kemiskinan (SDG1), ketahanan pangan (SDG2), kualitas pendidikan (SDG4), energi yang bersih dan terjangkau (SDG7), terciptanya pekerjaan yang layak dan ekonomi yang berkelanjutan (SDG8), industri, inovasi dan infrastruktur (SDG9), Mengurangi kesenjangan (SDG10), adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim (SDG13). Indonesia *blue economy roadmap* dimaksudkan untuk mempercepat target SDGs Indonesia. Transformasi perekonomian menuju *blue economy* juga selaras dengan visi Indonesia 2045 yang ditujukan untuk Indonesia keluar dari negara berpendapatan menengah (Sambodo & dkk, 2023, pp. 13-14). Indonesia *blue economy* memanfaatkan kekuatan Indonesia sebagai negara maritim dengan kolaborasi antara pengelolaan sumber daya laut yang diselaraskan dengan pembangunan maritim yang kompetitif, inovatif dan berkelanjutan.

Keanekaragaman sumber daya laut yang dimiliki Indonesia mengakibatkan banyaknya sektor-sektor yang dikembangkan dalam *blue economy roadmap*. Namun terdapat dua fokus sektor pembangunan yakni pengembangan pada sektor-sektor yang sudah mapan dan pengembangan pada sektor-sektor yang tergolong masih baru di Indonesia *blue economy*. Pembangunan pada sektor-sektor yang mapan ditujukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Pengembangan tersebut berfokus pada empat subsektor, yakni sektor perikanan tangkap dan budidaya laut, manufaktur berbasis kelautan, perdagangan maritim, transportasi dan logistik, serta sektor pariwisata (Sambodo & dkk, 2023, p. 66). Sektor terbesar dalam *blue economy* Indonesia yaitu sektor perikanan tangkap dan budidaya laut. Sektor ini memiliki peran penting dalam penyediaan pangan nasional bahkan global. Potensi dari perikanan tangkap dan budidaya laut (ikan) diperkirakan sekitar 67 juta ton per tahun. Perikanan tangkap sendiri menyumbang sekitar 10,2 juta ton per tahun dan perikanan budidaya menyumbang 56,8 juta ton per tahun. Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan perikanan yang sudah termasuk kedalam perikanan tangkap, dan perikanan budidaya dengan potensi yang dimiliki mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun (Humairoh, Setyaningrum, & Tanaya, 2024, pp. 3444-3445). Dengan potensi yang begitu besar pada sektor ini, terdapat

tantangan dan permasalahan yang dihadapi yakni penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan, masih rendahnya kualitas teknologi dan tata kelola sumber daya, serta lemahnya pengawasan dan sistem pendataan perikanan tangkap (Kusdiantoro & dkk, 2019, p. 146).

Subsektor yang kedua yakni manufaktur berbasis kelautan. Industri kelautan dimaksudkan untuk pengelolaan sumber daya laut agar dapat menciptakan produk dengan nilai tambah yang tinggi. Sektor ini memiliki banyak sekali tantangan terutama mengenai kesiapan Indonesia dalam penyediaan dan penguasaan teknologi, infrastruktur yang mendukung serta permasalahan keseimbangan ekosistem dalam proses pelaksanaan industri tersebut. Manufaktur berbasis kelautan memerlukan fokus pada pengembangan teknologi, peningkatan produktivitas dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan keberlanjutan ekosistem. Subsektor perdagangan maritim, transportasi dan logistik erat kaitannya dengan alur perdagangan antar pulau, sehingga fokus pengembangannya yakni pada transportasi laut. Dalam meningkatkan daya saing, transportasi laut pada *blue economy* dirancang untuk terintegrasi dengan transportasi udara dan darat. Subsektor ini dapat memanfaatkan jalur-jalur perdagangan laut yang strategis, seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan selat Malaka. Infrastruktur yang belum memadai, kurangnya bahan bakar dalam proses perdagangan maritim dan keamanan laut menjadi tantang pada subsektor ini (Sambodo & dkk, 2023, pp. 67-68).

Pengembangan pariwisata bahari menjadi subsektor terakhir yang menjadi prioritas dalam Indonesia *blue economy roadmap*. Kekayaan dan keindahan laut menjadi modal utama pada pengembangan pariwisata laut Indonesia. Dibalik potensi ekonomi yang sangat besar, pariwisata laut menemui banyak tantangan dalam proses pengembangannya, seperti fasilitas yang terbatas, polusi laut yang dihasilkan, serta kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola pariwisata masih sangat rendah (Donesia & dkk, 2023, p. 1956). Pengembangan pariwisata laut diarahkan pada pariwisata yang berkelanjutan yang memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan pada lingkungan sehingga keindahan laut yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati di masa yang berkepanjangan.

Selain sektor-sektor yang sudah berjalan sebelumnya terdapat sektor lainnya yang sedang di promosikan dalam Indonesia *blue economy roadmap*. Sektor-sektor tersebut terdiri atas energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi laut dan jasa ekosistem. Energi terbarukan lepas pantai menjadi sektor yang sangat diperlukan Indonesia dengan melihat perkembangan kondisi global sekarang. Bahan bakar fosil masih menjadi komoditas utama bagi suatu negara khususnya Indonesia, namun bahan bakar fosil tersebut jumlahnya terbatas. Pengembangan pada energi terbarukan lepas pantai

menjadi pilihan lainnya agar tidak tergantung pada bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan juga dapat berdampak pada lingkungan karena menyumbang hampir nol persen dari emisi gas rumah kaca dan polusi udara lainnya. Pengembangan sektor ini juga ditunjang dengan potensi yang dimiliki Indonesia, yakni potensi sumber panas air laut dalam bidang sumber energi terbarukan seperti *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC). Potensi lainnya yakni pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang sangat ramah lingkungan. Namun potensi ini dihadapkan pada tantangan dan permasalahan, seperti investasi dalam energi terbarukan lepas pantai masih sangat terbatas, studi dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia masih sangat terbatas dan infrastruktur penunjang masih sangat minim (Sidik & Sinaga, 2023, pp. 134-135).

Keanekaragaman hayati laut Indonesia menjadi peluang dalam sektor bioteknologi dan bioekonomi berbasis kelautan. Hal ini didukung oleh peningkatan pemahaman dalam proses teknologi kelautan di Indonesia. Indonesia dinilai perlu untuk merancang strategi dan kebijakan untuk pengembangan bioteknologi dan bioekonomi ini. Penguatan ekosistem yang terkait dengan sumber daya manusia dan komersialisasi teknologi, perbaikan infrastruktur yang menunjang, adanya kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga yang sudah mengembangkan bioteknologi berbasis kelautan di negara-negara lain, serta pengelolaan bioteknologi dan bioekonomi yang ramah lingkungan menjadi upaya-upaya yang harus dilakukan Indonesia demi mencapai target pada sektor ini. Sektor yang ketiga yakni penelitian dan pendidikan. Sektor ini sangat penting dalam keberlanjutan maritim Indonesia. Pengembangan penelitian dan pendidikan terkait kelautan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memahami untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia. Peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan penelitian maritim serta peningkatan sistem pendidikan adalah strategi yang dirancang oleh Indonesia demi mencapai *blue economy roadmap* (Sambodo & dkk, 2023, pp. 69-70).

Sektor yang terakhir dan tidak kalah pentingnya yakni Konservasi Laut dan Jasa Ekosistem. Konservasi laut berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem dan kawasan perlindungan laut. Pemerintah Indonesia telah menargetkan kawasan konservasi laut sebesar 32,5 juta hektar atau setara dengan 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Dengan perluasan pada sektor konservasi laut akan menjaga keanekaragaman hayati laut dan akan berdampak pada meningkatnya jasa ekosistem dan peluang ekonomi terutama bagi masyarakat pesisir. Konservasi laut akan mewujudkan *blue economy* yang berkelanjutan dan memastikan kesehatan produktivitas ekosistem pesisir dan laut dalam jangka panjang. Upaya yang harus dilakukan Indonesia dalam menunjang pengembangan sektor konservasi laut dan jasa

ekosistem yakni, kolaborasi dan kemitraan multipihak, peningkatan kebijakan dan penegakan hukum perlindungan laut, pengembangan mekanisme keuangan dan pendanaan, mendorong penelitian dan pengembangan karbon biru, serta merencanakan rancangan tata ruang pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara mekanisme perlindungan lingkungan laut dengan aktivitas masyarakat (Rusandi & dkk, 2021, pp. 138-139).

Sektor-sektor yang sudah ada dan dikembangkan dalam Indonesia *blue economy roadmap* begitu kompleks. Selain potensi keanekaragaman hayati laut yang dimiliki Indonesia terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai *blue economy roadmap*. Secara umum tantangan dan permasalahan tersebut terdiri atas, keberlanjutan ekosistem, sumber daya manusia yang masih sangat rendah, infrastruktur yang kurang memadai, investasi dan pendanaan, kesediaan teknologi yang menunjang, serta dampak kegiatan ekonomi biru terhadap lingkungan. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus memikirkan strategi agar visi dan misi Indonesia *blue economy roadmap* dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Salah satu strategi yang dicanangkan oleh Indonesia yakni kemitraan yang termuat dalam *National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP).

***National Blue Agenda Actions Partnership* (NBAAP) sebagai Strategi Indonesia**

National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP) merupakan strategi kemitraan Indonesia dalam mendukung ketercapaian Indonesia *blue economy roadmap*. NBAAP diinisiasi oleh Indonesia dan diluncurkan pada tahun 2022 di sela-sela KTT G20 Bali, Indonesia. Terdapat tiga kondisi yang menjadi latar belakang kemitraan NBAAP dibentuk oleh Indonesia dan ketiga tujuan ini selaras dengan Indonesia *blue economy roadmap*. Latar belakang pertama yakni untuk mencapai target pembangunan Indonesia dalam agenda biru yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kondisi kedua yakni masih terjadi kesenjangan antara kondisi sekarang dengan target pembangunan nasional khususnya mengenai agenda biru. NBAAP pula dimaksudkan untuk mencapai dua poin utama *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni kehidupan bawah air (*life below water*) dan kemitraan untuk tujuan (*partnership for the goals*) (NBAAP, 2022, p. 1).

Kemitraan pembangunan NBAAP terdiri atas Pemerintah Indonesia, United Nations Indonesia, dan mitra pembangunan pendukung. Pemerintah Indonesia dalam hal ini yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Perikanan dan Kelautan. United Nations terdiri atas

organisasi-organisasi terkait, seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Labour Organization (ILO)*, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)*, *United Nations Office for Project Services (UNOPS)*, serta *UN Women*. Mitra Pembangunan yang terkait terdiri atas, *Asian Development Bank (ADB)*, *Agence Francaise de Developpement (AFD)*, Pemerintah Kanada, Pemerintah Australia, *Swiss Confederation*, *British Embassy Jakarta*, *Embassy of The Federal Republic of Germany Jakarta*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *German Investment Bank (KfW)*, *Norwegian Embassy*, *World Bank*, and *U.S Agency for International Development (USAID)* (UN Indonesia, 2022, p. 1).

NBAAP memiliki empat pilar utama yang menjadi dasar dalam membuat dan menetapkan program. Pilar utama tersebut terdiri atas *blue health*, *blue food*, *blue innovation*, dan *blue finance*. *Blue health* berfokus dalam menjaga kesehatan kehidupan kelautan dan ekosistem. Terdapat 49 program *blue health* yang diantaranya adalah konservasi laut, restorasi, pengelolaan ekosistem, dan perencanaan tata ruang pesisir. *Blue food* memprioritaskan kepada praktik berkelanjutan yang ditujukan untuk kelestarian ekosistem laut dan keamanan pangan. *Blue food* memiliki 89 program yang diantaranya terdiri atas produksi dan konsumsi perikanan, akuakultur, serta keberlanjutan rantai pasokan. *Blue innovation* mendorong pada penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan sehingga berkontribusi pada konservasi laut. *Blue innovation* terdiri atas 27 program diantaranya adalah sains dan teknologi, pengembangan kapasitas, serta pengembangan sumber daya manusia. *Blue finance* berfokus untuk membangun mekanisme keuangan dan investasi yang akan mendukung pengembangan *blue economy*. Terdapat 20 program *blue finance* yang diantaranya adalah pembiayaan kreatif dan perusahaan rintisan baru (NBAAP, 2022, p. 1).

Pilar utama dan program-program dalam NBAAP sangat selaras dengan visi dan misi Indonesia *blue economy roadmap*. Komponen-komponen yang terlibat dalam NBAAP juga berasal dari setiap sektor-sektor yang menunjang dalam agenda *blue economy*. Solusi untuk tantangan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia termuat dalam program-program yang dicanangkan oleh NBAAP. Melihat potensi kerjasama ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam sektor *economy blue* sehingga pemanfaatan keanekaragaman hayati laut dapat berdampak pada perekonomian nasional, terkhusus bagi masyarakat.

NBAAP sebagai mitra internasional sangat menguntungkan bagi Indonesia dengan program-program yang ditawarkan dapat menunjang sektor-sektor yang dikembangkan

Indonesia. Sektor energi terbarukan, perdagangan maritim, dan manufaktur berbasis kelautan dapat dikembangkan lebih jauh dalam program-program *blue innovation* dan *blue finance* seperti penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur-infrastruktur penunjang, dan pembiayaan keratif. Sektor lainnya yakni konservasi laut, perikanan tangkap dan budidaya laut, serta bioteknologi dan bioekonomi dapat dikembangkan lebih lanjut dalam program-program *blue health* dan *blue food* yakni, keamanan pangan dengan praktik berkelanjutan bagi kelestarian ekosistem laut, program kesehatan kehidupan laut, serta produksi dan konsumsi perikanan dengan keberlanjutan rantai pasokan. Kemitraan ini juga didukung dan diperkuat oleh lembaga-lembaga *United Nations*, seperti FAO dalam sektor pangan dan UNESCO dalam sektor pengembangan dan penelitian Kerjasama dalam berbagai sektor-sektor *blue economy* ini dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan *blue economy*. Kondisi ini juga membuat Indonesia kedepannya dapat bekerjasama dan membangun kemitraan internasional lainnya dalam sektor *blue economy*. Keberhasilan kemitraan ini dapat pula menjadikan Indonesia sebagai percontohan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan bagi negara-negara di dunia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang begitu melimpah. Potensi ini dimanfaatkan Indonesia untuk membangun perekonomian yang berbasis kelautan. Konsep yang diterapkan Indonesia yakni konsep *blue economy*. *Konsep blue economy* yakni konsep ekonomi berkelanjutan yang berorientasi kepada laut. Konsep ini kemudian dirancang dalam sebuah rancangan jangka Panjang yang dikenal dengan Indonesia *blue economy roadmap* yang diluncurkan pada tahun 2022. Indonesia *blue economy roadmap* diharapkan dapat membawa perubahan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus ekonomi biru dan dapat mencapai tujuan Indonesia dalam SDGs. Berbagai sektor-sektor yang ada dan berjalan maupun yang sedang dikembangkan Indonesia diatur dalam Indonesia *blue economy roadmap*, seperti sektor perikanan tangkap dan budidaya laut, manufaktur berbasis kelautan, perdagangan maritim, transportasi dan logistik, sektor pariwisata, energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi laut dan jasa ekosistem.

Sektor-sektor tersebut menemui tantangan dan permasalahan dalam pengembangannya. Tantangan dan permasalahan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem, lingkungan laut, sumber daya manusia dan juga investasi dalam sektor kelautan. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, Indonesia harus mempunyai langkah yang signifikan

agar Indonesia *blue economy roadmap* bukan hanya sebatas rancangan saja tetapi dapat direalisasikan dan berdampak kepada masyarakat. Salah satu langkah Indonesia untuk menunjang Indonesia *blue economy roadmap* yakni membentuk strategi kemitraan internasional. Kemitraan internasional tersebut terdiri atas Pemerintah Indonesia (Kementerian terkait), *United Nations* Indonesia dengan organisasi-organisasi terkait, serta mitra pembangunan dalam bidangnya masing-masing. Kemitraan ini dikenal dengan National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali. NBAAP memiliki empat pilar utama yakni *blue health*, *blue food*, *blue innovation*, dan *blue finance*. Empat pilar NBAAP menjadi dasar dalam menjalankan program-program *blue economy roadmap*. Program-program dalam kemitraan NBAAP dapat menunjang terlaksananya Indonesia *blue economy roadmap*. Dengan adanya strategi kemitraan internasional ini diharapkan mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta Indonesia dapat mencapai tujuan dalam *blue economy* dan berdampak pada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Akase, S., Waha, C., & Lengkong, N. (2023). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*. 12(3), 1-9.
- Aryanti, D., Limayani, N., Retnosari, L., & Zulkifli, M. (2023). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bagaskara, A. M. (2018). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia. *Journal of International Relations*. 4(3), 367-375.
- BAPPENAS. (2021, November 25). *Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework for Indonesias Economic Transformation*. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ#:~:text=%E2%80%9CKerangka%20Pembangunan%20Ekonomi%20Biru%20diarahkan,kawasan%2C%E2%80%9D%20urair%20Menteri%20Suharso>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024
- BAPPENAS. (2022, September 6). *Di G20 DMM Side Event, Indonesia Prioritaskan Implementasi Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau*. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/di-g20-dmm-side-event-indonesia-prioritaskan-implementasi-ekonomi-biru-dan-ekonomi-hijau-U8NIh>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024
- Darajati, M. R. (2024). Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 14(1), 15-22.
- Donesia, E. A., & dkk. (2023). Konsep Blue Economy dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7(2), 1950-1959.

- Ghalidza, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal EconomI dan Bisnis*. 22(1), 27-31.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Humairoh, T. L., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2024). Keberlanjutan Blue Economy Melalui Kontribusi Industri Ikan Tangkap dan Budidaya Ikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*. 7(2), 3444-3452.
- Kemenko Maritim dan Investasi. (2022, Desember 6). *Kenalkan NBAAP ke AIS Forum, Pemerintah Indonesia Pertegas Pelaksanaan Agenda Biru*. Retrieved from maritim.go.id: <https://maritim.go.id/detail/kenalkan-nbaap-ke-ais-forum-pemerintah-indonesia-pertegas-pelaksanaan-agenda-biru>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024
- Kusdiantoro, Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 14(2), 145-162.
- Miftahudin, H. (2023). *RI Luncurkan Roadmap Ekonomi Biru Demi Wujudkan Visi Indonesia 2045*. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/NOICYvL-ri-luncurkan-roadmap-ekonomi-biru-demi-wujudkan-visi-indonesia-2045>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.
- NBAAP. (2022). *NBAAP: National Blue Agenda Actions Partnership* . Retrieved from nbaap.id: <https://www.nbaap.id/>. Diakses pada tanggal 03 November 2024
- Nurfauzi, N. R., & Mansur, U. (2022). Implementasi Konsep Blue Economy dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Masa New Normal. *SENAKOTA-Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* (pp. 75-82). Sukabumi: Universitas Nusa Putra.
- Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., & Sarmintohadi. (2021). Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia. *Marine Fisheries*. 12(2), 137-147.
- Sambodo, L. A., & dkk. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).
- Sidik, M., & Sinaga, N. (2023). Potensi Pemanfaatan Gelombang Laut Menjadi Tenaga Listrik dengan Metoda Oscillating Water Column di Pulau Bawean Gresik. *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. 4(2), 132-144.
- UN Indonesia. (2022). *National Blue Agenda Actions Partnership* . Retrieved from un.org: https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/chandrasa_nbaap_presentation_202212.pdf. Diakses pada tanggal 03 November 2024.
- Wardani, A. K., & Budiawan, A. (2021). Urgensi Kerjasama Internasional dalam Konsep Sound Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 8(3), 547-554.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(1), 2896-2910.